



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN LOGISTIK NASIONAL
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN EKONOMI DIGITAL
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ekko Harjanto

Jabatan : Plt. Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Ali Murtopo Simbolon

Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Perdagangan dan Ekonomi Digital

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Deputi Bidang Koordinasi Perdagangan dan
Ekonomi Digital

Ali Murtopo Simbolon

Jakarta, Januari 2026

Pihak Pertama,

Plt. Asisten Deputi
Pengembangan Logistik Nasional

Ekko Harjanto

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN LOGISTIK NASIONAL

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Sistem Logistik Nasional yang Berkualitas	1.1. Biaya Transportasi Logistik Angkutan Darat dan Laut terhadap PDB	3,50%
		1.2. Waktu Perputaran di Pelabuhan Tanjung Priok untuk Kegiatan Ekspor-Impor	1,3 – 1,7 (hari)
		1.3. Waktu Perputaran di Pelabuhan Tanjung Perak untuk Kegiatan Ekspor-Impor	1,3 – 1,7 (hari)
2	Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Logistik Nasional yang Berkualitas	2.1. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Penguatan Infrastruktur Konektivitas pada Angkutan Darat dan Laut	85%
		2.2. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Kinerja Bongkar Muat Peti Kemas untuk Kegiatan Ekspor-Impor di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak	85%
3	Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Logistik Nasional yang berkualitas	3.1. Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Logistik Nasional	3 dari 4 (Baik)
4	Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional yang Berkualitas	4.1. Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional	92%

Kegiatan	Anggaran
1. <i>Koordinasi Kebijakan Pengembangan Logistik Nasional</i>	Rp 1.497.852.000
Total	Rp 1,497,852,000,-

(Satu Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah)

Jakarta, Januari 2026

Deputi Bidang Koordinasi
Perniagaan dan Ekonomi Digital,

Plt. Asisten Deputi Pengembangan
Logistik Nasional,



Ali Murtopo Symbolon



Ekko Harjanto

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN LOGISTIK NASIONAL

KODE IKU: 1.1

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Sasaran Kegiatan	SS.1 Terwujudnya Sistem Logistik Nasional yang berkualitas
Deskripsi Sasaran Kegiatan	Sistem logistik nasional yang berkualitas adalah sistem yang menjamin efisiensi dan efektivitas kegiatan logistik, baik domestik maupun internasional, dengan melibatkan berbagai pihak terkait dan mencakup seluruh proses dari hulu hingga hilir guna meningkatkan kinerja logistik nasional, memperbaiki iklim investasi, dan daya saing perekonomian nasional..
Indikator Kinerja Utama (IKU)	1.1. Biaya Transportasi Logistik Angkutan Darat dan Laut terhadap PDB
Deskripsi IKU	<p>Definisi</p> <p>Biaya Transportasi Logistik Angkutan Darat dan Laut terhadap PDB adalah biaya/pengeluaran dalam rangka penanganan kegiatan logistik mulai dari titik awal sampai titik akhir yang menggunakan jasa angkutan darat dan jasa angkutan laut dibandingkan dengan nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi (PDB).</p> <p>Biaya jasa angkutan darat dan laut merupakan komponen dari biaya transportasi yang berkontribusi lebih dari 60%. Biaya jasa angkutan darat meliputi jasa angkutan darat selain angkutan rel, jasa angkutan rel, dan jasa angkutan sungai danau dan penyeberangan.</p> <p>Transportasi darat dan laut merupakan tulang punggung distribusi barang, baik untuk kebutuhan domestik maupun ekspor-impor:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Angkutan darat biasanya mendominasi distribusi jarak pendek hingga menengah dan menjadi penghubung antar wilayah produksi dan konsumsi. • Angkutan laut berperan penting dalam distribusi skala besar, terutama antar pulau dan perdagangan internasional. <p>Biaya transportasi logistik angkutan darat dan laut merupakan indikator penting dalam menilai efisiensi ekonomi suatu negara. Semakin kecil proporsinya terhadap PDB, semakin efisien sistem logistik yang dimiliki, dan semakin tinggi daya saing ekonomi nasional. Oleh karena itu, pengelolaan dan integrasi transportasi darat dan laut menjadi faktor strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.</p> <p>Formula</p> <p>a. Persentase Biaya Logistik Angkutan Darat selain Rel = (Nilai biaya jasa angkutan darat selain rel/nilai PDB) * 100%</p> <p>b. Persentase Biaya Logistik Angkutan Rel = (Nilai biaya jasa angkutan rel/nilai PDB) * 100%</p> <p>c. Persentase Biaya Logistik Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan = (Nilai biaya jasa angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan/nilai PDB) * 100%</p> <p>d. Persentase Biaya Logistik Angkutan Laut = (Nilai biaya jasa angkutan laut/nilai PDB) * 100%</p> <p>Persentase Biaya Transportasi Logistik Angkutan Darat dan Laut terhadap PDB = Persentase huruf a + Persentase huruf b + Persentase huruf c + Persentase huruf d</p> <p>Tujuan</p> <p>Memberikan gambaran kontribusi terhadap kenaikan atau penurunan biaya transportasi logistik.</p>
Satuan Pengukuran	Persentase

Unit/Pihak Penyedia Data	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS, Badan Pusat Statistik		
Pejabat Penanggung Jawab Data	Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional		
Sumber Data	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS		
Tingkat Kendali IKU	(...) High	(X) Moderate	(...) Low
Tingkat Validitas IKU	(...) Exact	(X) Proxy	(...) Activity
Jenis Konsolidasi Periode	(...) Sum	(...) Average	(X) Take Last Known Value
Jenis Cascading IKU	(X) Cascading Peta	(...) Cascading Non-Peta	(...) Non-Cascading
Metode Cascading	(...) Direct	(X) Indirect	
Polarisasi IKU	(...) Maximize	(X) Minimize	(...) Stabilize
Periode Pelaporan	(...) Bulanan	(...) Triwulanan	(...) Semesteran (X) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	N/A	3,82%*	3,58%	3,82%**	3,50%
s.d. Triwulan I	N/A	N/A	N/A	N/A	
s.d. Triwulan II	N/A	N/A	N/A	N/A	
s.d. Triwulan III	N/A	N/A	N/A	N/A	
s.d. Triwulan IV	N/A	N/A	N/A	N/A	

* Realisasi di tahun 2022 sebagai *baseline* realisasi tahun 2024 (sumber: RPJMN 2025-2029)

** Realisasi 2025 menggunakan realisasi 2024 (data sementara hingga realisasi riil 2025 dihitung Bappenas)

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN LOGISTIK NASIONAL

KODE IKU: 1.2

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Sasaran Kegiatan	SS.1 Terwujudnya Sistem Logistik Nasional yang berkualitas		
Deskripsi Sasaran Kegiatan	Sistem logistik nasional yang berkualitas adalah sistem yang menjamin efisiensi dan efektivitas kegiatan logistik, baik domestik maupun internasional, dengan melibatkan berbagai pihak terkait dan mencakup seluruh proses dari hulu hingga hilir guna meningkatkan kinerja logistik nasional, memperbaiki iklim investasi, dan daya saing perekonomian nasional..		
Indikator Kinerja Utama (IKU)	1.2. Waktu Perputaran di Pelabuhan Tanjung Priok untuk Kegiatan Ekspor Impor		
Deskripsi IKU	Definisi		
	<p>Waktu perputaran (Turn Around Time/TAT) di pelabuhan Tanjung Priok untuk kegiatan ekspor-impor adalah waktu yang dibutuhkan sebuah kapal untuk melakukan satu siklus lengkap di pelabuhan Tanjung Priok, mulai dari bersandar, bongkar muat, hingga akhirnya berlayar kembali. Waktu perputaran yang efisien sangat penting bagi efisiensi rantai pasokan dan kinerja pelabuhan secara keseluruhan. Waktu perputaran yang lama dapat menyebabkan penumpukan kapal di pelabuhan, keterlambatan pengiriman barang, dan peningkatan biaya logistik.</p> <p>Pelabuhan Tanjung Priok merupakan pelabuhan terbesar dan tersibuk yang menjadi barometer perekonomian Indonesia. Pelabuhan Tanjung Priok juga merupakan salah satu pintu utama proses ekspor-impor yang berkontribusi lebih dari 70% kegiatan ekspor-impor Indonesia bersama dengan Pelabuhan Tanjung Perak.</p> <p>Waktu perputaran (turnaround time) di pelabuhan Tanjung Priok difokuskan untuk kegiatan ekspor-impor yang menggunakan peti kemas.</p>		
	Formula		
	<p>Waktu Perputaran di Pelabuhan (TAT) = (Jumlah Waktu Keberangkatan Aktual – Waktu Tiba Aktual) : Jumlah Kapal</p> <p>Waktu Perputaran di Pelabuhan Tanjung Priok = $\frac{\sum \text{Rerata TAT Seluruh Bulan}}{12}$</p>		
	Tujuan		
	Memberikan gambaran kinerja pelabuhan Tanjung Priok dalam memperlancar kegiatan arus lalu lintas transportasi angkutan laut sebagai penunjang kegiatan ekspor dan impor secara umum		
Satuan Pengukuran	Hari		
Unit/Pihak Penyedia Data	Kementerian Perhubungan; Pengelola Pelabuhan Tanjung Priok; World Bank		
Pejabat Penanggung Jawab Data	Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional		
Sumber Data	Kementerian Perhubungan; Pengelola Pelabuhan Tanjung Priok; World Bank		
Tingkat Kendali IKU	(...) High	(X) Moderate	(...) Low
Tingkat Validitas IKU	(...) Exact	(X) Proxy	(...) Activity

Jenis Konsolidasi Periode	(...) Sum	(X) Average	(...) Take Last Known Value	
Jenis Cascading IKU	(X) Cascading Peta	(...) Cascading Non-Peta	(...) Non-Cascading	
Metode Cascading	(...) Direct		(X) Indirect	
Polarisasi IKU	(...) Maximize	(...) Minimize	(X) Stabilize	
Periode Pelaporan	(...) Bulanan	(X) Triwulanan	(...) Semesteran	(X) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	N/A	N/A	1,3 hari – 1,8 hari	1,31 hari*	1,3 hari – 1,7 hari
s.d. Triwulan I	N/A	N/A	1,3 hari – 1,8 hari	1,23 hari*	1,3 hari – 1,7 hari
s.d. Triwulan II	N/A	N/A	1,3 hari – 1,8 hari	1,21 hari*	1,3 hari – 1,7 hari
s.d. Triwulan III	N/A	N/A	1,3 hari – 1,8 hari	1,23 hari*	1,3 hari – 1,7 hari
s.d. Triwulan IV	N/A	N/A	1,3 hari – 1,8 hari	1,55 hari*	1,3 hari – 1,7 hari

* Data sementara (menunggu rilis World Bank)

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN LOGISTIK NASIONAL

KODE IKU: 1.3

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Sasaran Kegiatan	SS.1 Terwujudnya Sistem Logistik Nasional yang berkualitas		
Deskripsi Sasaran Kegiatan	Sistem logistik nasional yang berkualitas adalah sistem yang menjamin efisiensi dan efektivitas kegiatan logistik, baik domestik maupun internasional, dengan melibatkan berbagai pihak terkait dan mencakup seluruh proses dari hulu hingga hilir guna meningkatkan kinerja logistik nasional, memperbaiki iklim investasi, dan daya saing perekonomian nasional..		
Indikator Kinerja Utama (IKU)	1.2. Waktu Perputaran di Pelabuhan Tanjung Perak untuk Kegiatan Ekspor Impor		
Deskripsi IKU	Definisi		
	<p>Waktu perputaran (Turn Around Time/TAT) di pelabuhan Tanjung Perak untuk kegiatan ekspor-impor adalah waktu yang dibutuhkan sebuah kapal untuk melakukan satu siklus lengkap di pelabuhan Tanjung Perak, mulai dari bersandar, bongkar muat, hingga akhirnya berlayar kembali. Waktu perputaran yang efisien sangat penting bagi efisiensi rantai pasokan dan kinerja pelabuhan secara keseluruhan. Waktu perputaran yang lama dapat menyebabkan penumpukan kapal di pelabuhan, keterlambatan pengiriman barang, dan peningkatan biaya logistik.</p> <p>Pelabuhan Tanjung Perak merupakan pelabuhan terbesar dan tersibuk yang menjadi pintu masuk dan keluar barang-barang dari wilayah Indonesia Timur yang berkontribusi lebih dari 70% kegiatan ekspor-impor Indonesia bersama dengan Pelabuhan Tanjung Priok.</p> <p>Waktu perputaran (turnaround time) di pelabuhan Tanjung Perak difokuskan untuk kegiatan ekspor-impor yang menggunakan peti kemas.</p>		
	Formula		
	<p>Waktu Perputaran di Pelabuhan (TAT) = (Jumlah Waktu Keberangkatan Aktual – Waktu Tiba Aktual) : Jumlah Kapal</p> <p>Waktu Perputaran di Pelabuhan Tanjung Perak = $\frac{\sum \text{Rerata TAT Seluruh Bulan}}{12}$</p>		
	Tujuan		
	Memberikan gambaran kinerja pelabuhan Tanjung Perak dalam memperlancar kegiatan arus lalu lintas transportasi angkutan laut sebagai penunjang kegiatan ekspor dan impor secara umum		
Satuan Pengukuran	Hari		
Unit/Pihak Penyedia Data	Kementerian Perhubungan; Pengelola Pelabuhan Tanjung Perak; World Bank		
Pejabat Penanggung Jawab Data	Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional		
Sumber Data	Kementerian Perhubungan; Pengelola Pelabuhan Tanjung Perak; World Bank		
Tingkat Kendali IKU	(...) High	(X) Moderate	(...) Low
Tingkat Validitas IKU	(...) Exact	(X) Proxy	(...) Activity

Jenis Konsolidasi Periode	(...) Sum	(X) Average	(...) Take Last Known Value
Jenis Cascading IKU	(X) Cascading Peta	(...) Cascading Non-Peta	(...) Non-Cascading
Metode Cascading	(...) Direct	(X) Indirect	
Polarisasi IKU	(...) Maximize	(...) Minimize	(X) Stabilize
Periode Pelaporan	(...) Bulanan	(X) Triwulanan	(...) Semesteran (X) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	N/A	N/A	1,3 hari – 1,8 hari	1,13 hari*	1,3 hari – 1,7 hari
s.d. Triwulan I	N/A	N/A	1,3 hari – 1,8 hari	1,01 hari*	1,3 hari – 1,7 hari
s.d. Triwulan II	N/A	N/A	1,3 hari – 1,8 hari	1,38 hari*	1,3 hari – 1,7 hari
s.d. Triwulan III	N/A	N/A	1,3 hari – 1,8 hari	1,02 hari*	1,3 hari – 1,7 hari
s.d. Triwulan IV	N/A	N/A	1,3 hari – 1,8 hari	1,09 hari*	1,3 hari – 1,7 hari

* Data sementara (menunggu rilis World Bank)

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN LOGISTIK NASIONAL

KODE IKU: 2.1

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Sasaran Kegiatan	SS.2 Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Logistik Nasional yang berkualitas
Deskripsi Sasaran Kegiatan	<p>Kebijakan yang berkualitas ditandai oleh kejelasan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, serta keterkaitannya dengan visi, rencana pembangunan, dan mandat kelembagaan. Kebijakan yang berkualitas disusun melalui proses yang inklusif dan terkoordinasi, dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait serta mempertimbangkan keterpaduan lintas sektor untuk memastikan kebijakan tidak tumpang tindih, selaras dengan kebijakan lain, dan memperoleh dukungan dalam implementasinya. Terkait dengan itu mengamanatkan Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional dalam menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengembangan logistik nasional yang menjalankan fungsinya sebagai:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan dan atau merupakan arahan Presiden, berupa sinkronisasi dan koordinasi dalam perumusan, penetapan, serta pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengembangan logistik nasional; Perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengembangan logistik nasional; Pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengembangan logistik nasional; Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan logistik nasional; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital.
Indikator Kinerja Utama (IKU)	2.1. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, serta Pengendalian Kebijakan di Bidang <u>Penguatan Infrastruktur Konektivitas pada Angkutan Darat dan Laut</u>
Deskripsi IKU	<p>Definisi</p> <p>Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang Perekonomian. Proses Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 (empat) dimensi yaitu Perencanaan Kebijakan, Implementasi Kebijakan, Evaluasi dan Keberlanjutan Kebijakan, serta Transparansi dan Partisipasi Publik yang dihasilkan oleh Asisten Deputi diantaranya rumusan peraturan perundang-undangan, rumusan kelembagaan, rumusan perencanaan program, rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan). Adapun kegiatan sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian kebijakan terkait penguatan infrastruktur konektivitas pada angkutan darat dan laut, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> Penguatan ekosistem logistik nasional; Penguatan digitalisasi layanan logistik; Peningkatan daya saing sumber daya manusia di bidang logistik dan penyedia jasa logistik; dan Isu-isu lain yang berkembang selama tahun 2026 <p>Adapun nilai dari persentase efektivitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) dimensi siklus proses bisnis dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan sebagai berikut:</p> <p>Tahapan Pertama: Perencanaan Kebijakan Tahapan Pertama: Perencanaan kebijakan merupakan proses strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk merumuskan arah, tujuan, dan langkah kebijakan secara terencana, terukur, dan berkelanjutan. Perencanaan ini menjadi</p>

dasar dalam pengambilan keputusan agar kebijakan yang ditetapkan mampu menjawab permasalahan publik secara efektif serta selaras dengan prioritas pembangunan.

Adapun keluaran yang dihasilkan dalam tahapan ini antara lain:

- Undangan rapat dan Daftar Hadir Rapat terkait Perencanaan Kebijakan;
- Notula/ Risalah/ Berita acara terkait Perencanaan Kebijakan;
- Kajian dalam bentuk policy paper, policy brief, dan/atau telaahan staf tentang urgensi penanganan isu kebijakan;
- Naskah Urgensi;
- Buku Referensi Kebijakan;
- Laporan Hasil Evaluasi;
- Konsep Alternatif Kebijakan dan Program;
- Dokumentasi uji coba atau piloting; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen);
- Rumusan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan dari K/L lain/Peraturan Pemerintah/Perpres peraturan dari KL lain yang merupakan hasil sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian Kemenko Perekonomian) rumusan kelembagaan;
- Kertas Kerja Kebijakan;
- Rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan).

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah:

1. Undangan rapat dan daftar hadir.
2. Notula/risalah rapat

Tahapan Kedua: Implementasi Kebijakan

Tahapan Implementasi kebijakan merupakan tahapan pelaksanaan dari kebijakan yang telah ditetapkan agar tujuan dan sasaran yang direncanakan dapat tercapai secara efektif. Tahap ini berfokus pada penerjemahan kebijakan ke dalam program, kegiatan, dan tindakan nyata yang dilaksanakan oleh unit atau pihak terkait sesuai dengan kewenangan dan perannya masing-masing. Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini antara lain:

- Surat Deputi tentang strategi implementasi kebijakan, pengorganisasian, sumber daya dan anggaran; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen);
- Rumusan perencanaan program;
- Memo Kebijakan;
- Juklak/Juknis;
- Kajian dalam bentuk policy paper, policy brief, dan/atau telaahan staf tentang alternatif kebijakan/program yang diambil;
- Buku Referensi Kebijakan;
- Undangan rapat, notula, dan daftar hadir rapat penyusunan atau pembahasan implementasi Kebijakan;
- Laporan Hasil Evaluasi;
- Dokumentasi Analisis Implementasi Kebijakan;
- Dokumentasi uji coba atau piloting; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen).

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah:

1. Surat Deputi
2. Undangan rapat, notula, dan daftar hadir

Tahapan Ketiga: Evaluasi dan Keberlanjutan Kebijakan

Pada tahapan ini, evaluasi merupakan proses penilaian yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk mengukur tingkat efektivitas, efisiensi, relevansi, dan dampak pelaksanaan kebijakan, dengan tujuan mengetahui sejauh mana kebijakan yang telah diimplementasikan mampu mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta mengidentifikasi kendala, risiko, dan area perbaikan. Hasil evaluasi tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam menjamin keberlanjutan kebijakan, yaitu upaya untuk memastikan kebijakan dapat dipertahankan, dikembangkan, dan memberikan manfaat jangka panjang melalui penguatan kelembagaan, integrasi kebijakan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan sistem pendukung. Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini antara lain:

- Rumusan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan dari K/L lain/Peraturan Pemerintah/Perpres peraturan dari KL lain yang merupakan hasil sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian Kemenko Perekonomian) rumusan kelembagaan;
- Kertas Kerja Kebijakan;
- Rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan);
- Memo Kebijakan;
- Hasil Konsultasi;
- Laporan Hasil Evaluasi;
- Dokumen/Kajian tentang efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan.

Adapun rumusan kebijakan yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah:

1. Laporan hasil evaluasi
2. Memo kebijakan.

Tahapan Keempat: Transparansi dan Partisipasi Publik

Pada tahapan ini Transparansi memastikan bahwa informasi terkait kebijakan, program, dan kinerja pemerintah dapat diakses secara jelas, tepat waktu, dan mudah dipahami oleh masyarakat, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pengambilan

	<p>keputusan, sementara partisipasi publik mendorong keterlibatan aktif masyarakat dan pemangku kepentingan dalam seluruh tahapan kebijakan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, guna memberikan masukan, aspirasi, dan perspektif yang beragam dalam rangka meningkatkan kualitas kebijakan serta memastikan kesesuaiannya dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Deputi tentang strategi komunikasi dan Dokumentasi pelaksanaan komunikasi kebijakan; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen) • Memo Kebijakan; • Rancangan Kebijakan; • Hasil Konsultasi; <p>Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini Adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Deputi 2. Memo kebijakan. 		
	Formula		
	<p>1. Perhitungan Realisasi Tahapan Pertama</p> $\text{Nilai Tahapan Pertama} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 20\%$ <p>2. Perhitungan Realisasi Tahapan Kedua</p> $\text{Nilai Tahapan Kedua} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 25\%$ <p>3. Perhitungan Realisasi Tahapan Ketiga</p> $\text{Nilai Tahapan Ketiga} = \frac{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan}}{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang ditargetkan}} \times 27,5\%$ <p>4. Perhitungan Realisasi Tahapan Keempat</p> $\text{Nilai Tahapan Keempat} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27,5\%$ <p>5. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Penguatan Infrastruktur Konektivitas pada Angkutan Darat dan Laut</p> <p>% efektivitas SKP= Nilai Tahapan Pertama+Nilai Tahapan Kedua+Nilai Tahapan ketiga+Nilai Tahapan keempat</p>		
	Tujuan		
	Untuk mengukur tingkat efektivitas dari proses Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan terkait Penguatan Infrastruktur Konektivitas pada Angkutan Darat dan Laut		
Satuan Pengukuran	Persentase		
Unit/Pihak Penyedia Data	Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional		
Pejabat Penanggung Jawab Data	Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional		
Sumber Data	Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional		
Tingkat Kendali IKU	(...) High	(X) Moderate	(...) Low
Tingkat Validitas IKU	(X) Exact	(.....) Proxy	(...) Activity
Jenis Konsolidasi Periode	(...) Sum	(...) Average	(X) Take Last Known Value

Jenis Cascading IKU	(X) Cascading Peta	(...) Cascading Non-Peta	(...) Non-Cascading
Metode Cascading	(...) Direct	(X) Indirect	
Polarisasi IKU	(X) Maximize	(...) Minimize	(...) Stabilize
Periode Pelaporan	(...) Bulanan	(X) Triwulanan	(...) Semesteran (...) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	80%	80%	80%	80%	85%
s.d. Triwulan I	20%	20%	20%	20%	20%
s.d. Triwulan II	40%	40%	40%	40%	45%
s.d. Triwulan III	60%	60%	60%	60%	65%
s.d. Triwulan IV	80%	80%	80%	80%	85%

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN LOGISTIK NASIONAL

KODE IKU: 2.2

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Sasaran Kegiatan	SS.2 Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Logistik Nasional yang berkualitas
Deskripsi Sasaran Kegiatan	<p>Kebijakan yang berkualitas ditandai oleh kejelasan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, serta keterkaitannya dengan visi, rencana pembangunan, dan mandat kelembagaan. Kebijakan yang berkualitas disusun melalui proses yang inklusif dan terkoordinasi, dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait serta mempertimbangkan keterpaduan lintas sektor untuk memastikan kebijakan tidak tumpang tindih, selaras dengan kebijakan lain, dan memperoleh dukungan dalam implementasinya. Terkait dengan itu mengamanatkan Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional dalam menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengembangan logistik nasional yang menjalankan fungsinya sebagai:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan dan atau merupakan arahan Presiden, berupa sinkronisasi dan koordinasi dalam perumusan, penetapan, serta pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengembangan logistik nasional; Perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengembangan logistik nasional; Pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengembangan logistik nasional; Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan logistik nasional; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Perdagangan dan Ekonomi Digital.
Indikator Kinerja Utama (IKU)	2.2. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, serta Pengendalian Kebijakan di Bidang Kinerja Bongkar Muat Peti Kemas untuk Kegiatan Ekspor-Impor di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak
Deskripsi IKU	<p>Definisi</p> <p>Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang Perekonomian. Proses Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 (empat) dimensi yaitu Perencanaan Kebijakan, Implementasi Kebijakan, Evaluasi dan Keberlanjutan Kebijakan, serta Transparansi dan Partisipasi Publik yang dihasilkan oleh Asisten Deputi diantaranya rumusan peraturan perundang-undangan, rumusan kelembagaan, rumusan perencanaan program, rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan). Adapun kegiatan sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian kebijakan terkait kinerja bongkar muat peti kemas untuk kegiatan ekspor-impor di pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> Penyamaan definisi indikator <i>ship turnaround time</i>, <i>dwelling time impor & ekspor</i>, <i>aviation container dwelling time</i>; dan <i>postal delivery time</i>; Penyusunan regulasi tentang definisi indikator <i>ship turnaround time</i>, <i>dwelling time impor & ekspor</i>, <i>aviation container dwelling time</i>; dan <i>postal delivery time</i>; Pembangunan dashboard indikator kinerja <i>ship turnaround time</i>, <i>dwelling time impor & ekspor</i>, <i>aviation container dwelling time</i>; dan <i>postal delivery time</i>; dan Isu-isu lain yang berkembang selama tahun 2026 <p>Adapun nilai dari persentase efektivitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) dimensi siklus proses bisnis dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan sebagai berikut:</p> <p>Tahapan Pertama: Perencanaan Kebijakan</p> <p>Tahapan Pertama: Perencanaan kebijakan merupakan proses strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk merumuskan arah, tujuan, dan langkah kebijakan secara terencana, terukur, dan berkelanjutan. Perencanaan ini menjadi</p>

dasar dalam pengambilan keputusan agar kebijakan yang ditetapkan mampu menjawab permasalahan publik secara efektif serta selaras dengan prioritas pembangunan.

Adapun keluaran yang dihasilkan dalam tahapan ini antara lain:

- Undangan rapat dan Daftar Hadir Rapat terkait Perencanaan Kebijakan;
- Notula/ Risalah/ Berita acara terkait Perencanaan Kebijakan;
- Kajian dalam bentuk policy paper, policy brief, dan/atau telaahan staf tentang urgensi penanganan isu kebijakan;
- Naskah Urgensi;
- Buku Referensi Kebijakan;
- Laporan Hasil Evaluasi;
- Konsep Alternatif Kebijakan dan Program;
- Dokumentasi uji coba atau piloting; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen);
- Rumusan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan dari K/L lain/Peraturan Pemerintah/Perpres peraturan dari KL lain yang merupakan hasil sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian Kemenko Perekonomian) rumusan kelembagaan;
- Kertas Kerja Kebijakan;
- Rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan).

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah:

1. Undangan rapat dan daftar hadir.
2. Notula/risalah rapat
3. Rumusan peraturan perundang-undangan

Tahapan Kedua: Implementasi Kebijakan

Tahapan Implementasi kebijakan merupakan tahapan pelaksanaan dari kebijakan yang telah ditetapkan agar tujuan dan sasaran yang direncanakan dapat tercapai secara efektif. Tahap ini berfokus pada penerjemahan kebijakan ke dalam program, kegiatan, dan tindakan nyata yang dilaksanakan oleh unit atau pihak terkait sesuai dengan kewenangan dan perannya masing-masing. Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini antara lain:

- Surat Deputi tentang strategi implementasi kebijakan, pengorganisasian, sumber daya dan anggaran; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen);
- Rumusan perencanaan program;
- Memo Kebijakan;
- Juklak/Juknis;
- Kajian dalam bentuk policy paper, policy brief, dan/atau telaahan staf tentang alternatif kebijakan/program yang diambil;
- Buku Referensi Kebijakan;
- Undangan rapat, notula, dan daftar hadir rapat penyusunan atau pembahasan implementasi Kebijakan;
- Laporan Hasil Evaluasi;
- Dokumentasi Analisis Implementasi Kebijakan;
- Dokumentasi uji coba atau piloting; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen).

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah:

1. Surat Deputi
2. Undangan rapat, notula, dan daftar hadir

Tahapan Ketiga: Evaluasi dan Keberlanjutan Kebijakan

Pada tahapan ini, evaluasi merupakan proses penilaian yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk mengukur tingkat efektivitas, efisiensi, relevansi, dan dampak pelaksanaan kebijakan, dengan tujuan mengetahui sejauh mana kebijakan yang telah diimplementasikan mampu mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta mengidentifikasi kendala, risiko, dan area perbaikan. Hasil evaluasi tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam menjamin keberlanjutan kebijakan, yaitu upaya untuk memastikan kebijakan dapat dipertahankan, dikembangkan, dan memberikan manfaat jangka panjang melalui penguatan kelembagaan, integrasi kebijakan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan sistem pendukung. Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini antara lain:

- Rumusan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan dari K/L lain/Peraturan Pemerintah/Perpres peraturan dari KL lain yang merupakan hasil sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian Kemenko Perekonomian) rumusan kelembagaan;
- Kertas Kerja Kebijakan;
- Rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan);
- Memo Kebijakan;
- Hasil Konsultasi;
- Laporan Hasil Evaluasi;
- Dokumen/Kajian tentang efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan.

Adapun rumusan kebijakan yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah:

1. Laporan hasil evaluasi
2. Memo kebijakan.

	<p>Tahapan Keempat: Transparansi dan Partisipasi Publik</p> <p>Pada tahapan ini Transparansi memastikan bahwa informasi terkait kebijakan, program, dan kinerja pemerintah dapat diakses secara jelas, tepat waktu, dan mudah dipahami oleh masyarakat, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pengambilan keputusan, sementara partisipasi publik mendorong keterlibatan aktif masyarakat dan pemangku kepentingan dalam seluruh tahapan kebijakan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, guna memberikan masukan, aspirasi, dan perspektif yang beragam dalam rangka meningkatkan kualitas kebijakan serta memastikan kesesuaiannya dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Deputi tentang strategi komunikasi dan Dokumentasi pelaksanaan komunikasi kebijakan; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen) • Memo Kebijakan; • Rancangan Kebijakan; • Hasil Konsultasi; <p>Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini Adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Deputi 2. Memo kebijakan. 		
	Formula		
	<p>1. Perhitungan Realisasi Tahapan Pertama</p> $\text{Nilai Tahapan Pertama} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 20\%$ <p>2. Perhitungan Realisasi Tahapan Kedua</p> $\text{Nilai Tahapan Kedua} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 25\%$ <p>3. Perhitungan Realisasi Tahapan Ketiga</p> $\text{Nilai Tahapan Ketiga} = \frac{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan}}{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang ditargetkan}} \times 27,5\%$ <p>4. Perhitungan Realisasi Tahapan Keempat</p> $\text{Nilai Tahapan Keempat} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27,5\%$ <p>5. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Kinerja Bongkar Muat Peti Kemas untuk Kegiatan Ekspor-Impor di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak</p> <p>% efektivitas SKP= Nilai Tahapan Pertama+Nilai Tahapan Kedua+Nilai Tahapan ketiga+Nilai Tahapan keempat</p>		
	Tujuan		
	Untuk mengukur tingkat efektivitas dari proses Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan terkait Kinerja Bongkar Muat Peti Kemas untuk Kegiatan Ekspor-Impor di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak		
Satuan Pengukuran	Persentase		
Unit/Pihak Penyedia Data	Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional		
Pejabat Penanggung Jawab Data	Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional		
Sumber Data	Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional		
Tingkat Kendali IKU	(...) High	(X) Moderate	(...) Low
Tingkat Validitas IKU	(X) Exact	(.....) Proxy	(...) Activity

Jenis Konsolidasi Periode	(...) Sum	(...) Average	(X) Take Last Known Value
Jenis Cascading IKU	(X) Cascading Peta	(...) Cascading Non-Peta	(...) Non-Cascading
Metode Cascading	(...) Direct	(X) Indirect	
Polarisasi IKU	(X) Maximize	(...) Minimize	(...) Stabilize
Periode Pelaporan	(...) Bulanan	(X) Triwulanan	(...) Semesteran (...) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	80%	80%	80%	80%	85%
s.d. Triwulan I	20%	20%	20%	20%	20%
s.d. Triwulan II	40%	40%	40%	40%	45%
s.d. Triwulan III	60%	60%	60%	60%	65%
s.d. Triwulan IV	80%	80%	80%	80%	85%

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN LOGISTIK NASIONAL

KODE IKU: 3.1

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Sasaran Kegiatan	SS.3 Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Logistik Nasional yang berkualitas
Deskripsi Sasaran Kegiatan	<p>Layanan yang berkualitas merupakan layanan yang diselenggarakan secara profesional dan berstandar sehingga mampu memberikan kepastian proses, kemudahan akses, serta hasil layanan yang bermanfaat dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, layanan yang berkualitas ditandai dengan kemampuan penyelenggara layanan dalam merespons kebutuhan, masukan, dan permasalahan secara cepat, tepat, dan solutif, serta memastikan adanya tindak lanjut yang jelas dan terukur. Pelaksanaan layanan yang berkualitas meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Efektivitas fasilitasi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan; b) Responsivitas terhadap kebutuhan koordinasi lintas sektor; c) Akurasi informasi dan berbasis data yang valid; d) Transparansi proses dan hasil pelayanan; e) Pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung layanan.
Indikator Kinerja Utama (IKU)	3.1. Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Logistik Nasional
Deskripsi IKU	<p>Definisi</p> <p>Mengukur indikator tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional dengan melakukan survei pelayanan ke Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait. Nilai indeks diperoleh dari nilai rata-rata hasil kuesioner yang telah diisi oleh koresponden, dengan empat kategori penilaian, yaitu (1) Sangat Tidak Puas, (2) Tidak Puas, (3) Puas, dan (4) Sangat Puas, rumus perhitungan sebagai berikut:</p> <p>Formula</p> <p>Mengukur indikator tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional dengan melakukan survei pelayanan ke Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait. Nilai indeks diperoleh dari nilai rata-rata hasil kuesioner yang telah diisi oleh koresponden, dengan empat kategori penilaian, yaitu (1) Sangat Tidak Puas, (2) Tidak Puas, (3) Puas, dan (4) Sangat Puas, rumus perhitungan sebagai berikut:</p> $\text{Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian} = \frac{\sum \text{Rerata jawaban dari masing-masing item survey}}{\text{Jumlah Item Survey}}$ <p>Nilai indeks diperoleh dari nilai rata-rata hasil kuesioner yang telah diisi oleh responden untuk masing-masing unit eselon II, dengan empat kategori penilaian:</p> <ol style="list-style-type: none"> A. Sangat Puas (4), rentang nilai 3.51 s.d 4 B. Puas (3), rentang nilai 3.01 s.d 3.50 C. Tidak Puas (2), rentang nilai 2.51 s.d 3.00 D. Sangat Tidak Puas (1), rentang nilai <2.50
	Tujuan
	Mengukur tingkat kepuasan di proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan terkait dengan pengembangan logistik nasional sehingga mendorong terciptanya kebijakan yang berkualitas.

Satuan Pengukuran	Indeks		
Unit/Pihak Penyedia Data	Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional		
Pejabat Penanggung Jawab Data	Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional		
Sumber Data	Hasil Survei Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang _____		
Tingkat Kendali IKU	(...) High	(X) Moderate	(...) Low
Tingkat Validitas IKU	(X) Exact	(....) Proxy	(...) Activity
Jenis Konsolidasi Periode	(....) Sum	(...) Average	(X) Take Last Known Value
Jenis Cascading IKU	(X) Cascading Peta	(...) Cascading Non-Peta	(...) Non-Cascading
Metode Cascading	(...) Direct	(X) Indirect	
Polarisasi IKU	(X) Maximize	(...) Minimize	(...) Stabilize
Periode Pelaporan	(....) Bulanan	(X) Triwulanan	(...) Semesteran
			(...) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	Baik (3 dari 4)	Baik (3 dari 4)	Baik (3 dari 4)	Baik (3 dari 4)	Baik (3 dari 4)
s.d. Triwulan I	-	-	-	-	-
s.d. Triwulan II	Baik (3 dari 4)	Baik (3 dari 4)	Baik (3 dari 4)	Baik (3 dari 4)	Baik (3 dari 4)
s.d. Triwulan III	-	-	-	-	-
s.d. Triwulan IV	Baik (3 dari 4)	Baik (3 dari 4)	Baik (3 dari 4)	Baik (3 dari 4)	Baik (3 dari 4)

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN LOGISTIK NASIONAL	KODE IKU:
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	4.1

Sasaran Kegiatan	SS.4 Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional yang berkualitas
Deskripsi Sasaran Kegiatan	Pelaksanaan tata kelola organisasi yang baik merupakan pengelolaan organisasi yang dilaksanakan secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien melalui kejelasan struktur organisasi, proses bisnis, serta pembagian peran dan tanggung jawab. Tata kelola tersebut bertujuan untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan secara optimal, berorientasi pada hasil, serta mendukung pencapaian tujuan organisasi secara terukur dan berkelanjutan. Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional yang Baik merupakan sasaran kegiatan pada Perspektif Pengembangan Internal yang diturunkan dari sasaran strategis Perspektif Pengembangan Internal pada level ke deputian. Ketercapaian sasaran kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas organisasi, sistem kerja, dan sumber daya pendukung, sehingga mampu mendukung terselenggaranya proses bisnis yang berfokus pada koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan secara efektif di lingkungan Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional.
Indikator Kinerja Utama (IKU)	4.1. Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional
Deskripsi IKU	<p>Definisi</p> <p>Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional merupakan indikator yang menggambarkan keberhasilan pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional. Adapun komponen penilaian Reformasi Birokrasi di level Asisten Deputi didasarkan pada tingkat implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi General dan/ atau Reformasi Birokrasi Tematik di lingkungan Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional. Implementasi kegiatan RB General dan/ atau Tematik harus didasarkan dan disesuaikan pada rencana aksi yang telah disusun pada awal tahun sebagaimana diatur dalam peraturan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.</p> <p>Adapun pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan dan penetapan tim kerja, sebanyak 1 rencana aksi 2. Penyusunan matriks manajemen risiko, sebanyak 1 rencana aksi 3. Penyusunan dan penetapan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, dan Manual IKU, sebanyak 1 rencana aksi 4. Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan, sebanyak 4 rencana aksi 5. Penyusunan draft Perjanjian Kinerja Tahun 2027, sebanyak 1 rencana aksi 6. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) 2027, sebanyak 1 rencana aksi 7. Penyusunan revisi Renja 2026, sebanyak 1 rencana aksi 8. Penyusunan TOR dan RAB revisi Renja 2026, sebanyak 1 rencana aksi 9. Monitoring capaian kinerja Rincian Output (RO) Prioritas Nasional setiap triwulan pada tahun 2026, sebanyak 4 rencana aksi 10. Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI, sebanyak 4 rencana aksi <p>Formula</p> <p>Persentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional dihitung berdasarkan seberapa banyak pelaksanaan RB General dan/atau RB Tematik di Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional dibandingkan dengan jumlah keseluruhan rencana aksi yang telah disusun. Berikut merupakan formulasi dalam menentukan persentase pelaksanaan rencana aksi RB Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional:</p>

	$\% \text{ Pelaksanaan Renaksi RB} = \frac{\text{Total Renaksi RB yang dilaksanakan}}{\text{Total Renaksi RB yang dirumuskan}} \times 100\%$		
	Tujuan		
	Indikator ini bertujuan untuk mengukur tingkat pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional		
Satuan Pengukuran	Persentase		
Unit/Pihak Penyedia Data	Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional		
Pejabat Penanggung Jawab Data	Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional		
Sumber Data	Rekapitulasi/Tabulasi Data pengumpulan bukti dukung dalam rangka penilaian Reformasi Birokrasi tingkat Kementerian		
Tingkat Kendali IKU	(X) High	(...) Moderate	(...) Low
Tingkat Validitas IKU	(...) Exact	(X) Proxy	(...) Activity
Jenis Konsolidasi Periode	(...) Sum	(...) Average	(X) Take Last Known Value
Jenis Cascading IKU	(X) Cascading Peta	(...) Cascading Non-Peta	(...) Non-Cascading
Metode Cascading	(...) Direct	(X) Indirect	
Polarisasi IKU	(X) Maximize	(...) Minimize	(...) Stabilize
Periode Pelaporan	(...) Bulanan	(X) Triwulanan	(...) Semesteran
			(...) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	N/A	N/A	85%	85%	92%
s.d. Triwulan I	N/A	N/A	20%	20%	20%
s.d. Triwulan II	N/A	N/A	40%	40%	45%
s.d. Triwulan III	N/A	N/A	60%	60%	65%
s.d. Triwulan IV	N/A	N/A	85%	85%	92%

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN LOGISTIK NASIONAL

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Terwujudnya Sistem Logistik Nasional yang Berkualitas	Biaya Transportasi Logistik Angkutan Darat dan Laut terhadap PDB	3,50%	<ol style="list-style-type: none"> Digitalisasi dan Integrasi Layanan Logistik Peningkatan Kapasitas Profesi <i>Freight Forwarder</i> dan <i>Warehouse Controller</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Pemetaan sistem dan layanan logistik Penyusunan tim koordinasi nasional digitalisasi dan integrasi logistik Permintaan masukan standar kualifikasi umum profesi <i>freight forwarder</i> dan <i>warehouse controller</i> Penyusunan tim tim koordinasi nasional penyusunan standar umum profesi <i>freight forwarder</i> dan <i>warehouse controller</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan desain integrasi sistem Sinkronisasi regulasi kementerian/ lembaga terkait digitalisasi dan integrasi layanan logistik Pemetaan kualifikasi umum profesi <i>freight forwarder</i> dan <i>warehouse controller</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Penetapan prioritas integrasi layanan logistik Penyelarasan kualifikasi umum profesi <i>freight forwarder</i> dan <i>warehouse controller</i> di tingkat ASEAN 	<ul style="list-style-type: none"> Implementasi integrasi layanan logistik prioritas Monitoring dan evaluasi implementasi integrasi layanan logistik prioritas Kesepakatan kualifikasi umum profesi <i>freight forwarder</i> dan <i>warehouse controller</i> di tingkat ASEAN Perencanaan kegiatan penanganan isu di tahun 2027

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					TW I	TW II	TW III	TW/IV
		Waktu Perputaran di Pelabuhan Tanjung Priok untuk Kegiatan Ekspor-Import	1,3 – 1,7 (hari)	Peningkatan Kinerja Bongkar Muat di Terminal Peti Kemas Pelabuhan Tanjung Priok	<ul style="list-style-type: none"> Pemetaan dan identifikasi permasalahan kinerja bongkar muat di pelabuhan Tanjung Priok 	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan strategi untuk peningkatan kinerja kegiatan bongkar muat di pelabuhan Tanjung Priok Monitoring dan evaluasi kinerja kegiatan bongkar muat di pelabuhan Tanjung Perak 	<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi dan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan terkait strategi untuk peningkatan kinerja kegiatan bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok 	<ul style="list-style-type: none"> Monitoring dan evaluasi kinerja kegiatan bongkar muat di pelabuhan Tanjung Perak Perencanaan kegiatan penanganan isu di tahun 2027
2	Terwujudnya Kebijakan Pengembangan	Persentase Efektivitas Sinkronisasi,	85%	Rekomendasi kebijakan terkait Penguatan	<ul style="list-style-type: none"> Identifikasi permasalahan terkait 	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan alternatif rekomendasi 	<ul style="list-style-type: none"> Rapat koordinasi penyusunan 	<ul style="list-style-type: none"> Monitoring dan evaluasi pelaksanaan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
	Logistik Nasional yang Berkualitas	Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Penguatan Infrastruktur Konektivitas pada Angkutan Darat dan Laut	85%	Rekomendasi kebijakan terkait Kinerja Bongkar Muat Peti Kemas untuk Kegiatan Ekspor-Impor di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak	<ul style="list-style-type: none"> Identifikasi permasalahan layanan dan sarana bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok dan Pelabuhan Tanjung Perak 	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan alternatif rekomendasi kebijakan untuk peningkatan layanan dan sarana bongkar muat peti kemas di Pelabuhan 	<ul style="list-style-type: none"> Rapat koordinasi penyusunan dan/atau penetapan rekomendasi kebijakan untuk peningkatan layanan dan sarana bongkar muat 	<ul style="list-style-type: none"> Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan peningkatan layanan dan sarana bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
3	Terwujudnya Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Koordinasi Pengembangan Logistik Nasional yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Logistik Nasional	3 dari 4 (Baik)	Terpenuhinya seluruh layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kepada stakeholder demi terciptanya kebijakan yang berkualitas	Persiapan Pelaksanaan Survei Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Logistik Nasional	Pelaksanaan dan Pelaporan Survei Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Logistik Nasional Semester I	Tindak lanjut Pelaksanaan dan Pelaporan Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Logistik Nasional Semester I	Pelaksanaan dan Pelaporan Survei Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Logistik Nasional Semester II
		Tanjung Priok dan Tanjung Perak				Tanjung Priok dan Tanjung Perak	peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak	dan Tanjung Perak <ul style="list-style-type: none"> Rapat koordinasi tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi, pelaksanaan kebijakan Perencanaan Kegiatan Penanganan Isu di Tahun 2026

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
4	Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional yang Berkualitas	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional	92%	<ol style="list-style-type: none"> Tingkat Capaian Kebijakan Sistem Kerja Baru dan Fleksibilitas Bekerja Pegawai Tingkat Maturltas SPIP Nilai SAKIP Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (KL) Capaian Prioritas Nasional (K/L) Tingkat Digitalisasi Arsip 	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan dan Penetapan Tim Kerja Penyusunan dan Penetapan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi dan Manual IKU Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I Penyusunan Renja 2027 Monitoring Capaian Kinerja Rincian Output (RO) Prioritas Nasional Triwulan I Optimalisasi Pemanfaatan SRIKANDI Triwulan I 	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan II Penyusunan Revisi Renja 2026 Monitoring Capaian Kinerja Rincian Output (RO) Prioritas Nasional Triwulan II Optimalisasi Pemanfaatan Srikandi Triwulan II 	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan Matriks Manajemen Risiko Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan III Penyusunan TOR Dan RAB Atas Revisi Renja 2026 Monitoring Capaian Kinerja Rincian Output (RO) Prioritas Nasional Triwulan III Optimalisasi Pemanfaatan SRIKANDI Triwulan III 	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan IV Penyusunan Draft Perjanjian Kinerja Tahun 2027 Monitoring Capaian Kinerja Rincian Output (RO) Prioritas Nasional Triwulan IV Optimalisasi Pemanfaatan Srikandi Triwulan IV

Jakarta, Januari 2026
Pit. Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional



Ekko Harjanto